Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan
Volume 04, No. 02, September – December 2026, pp. 3768- 3776
E-ISSN: 2988-7720
Website: https://pcpendidikan.org/index.php/jpcp

Menimbang Kredibilitas Perawi: Kaidah, Tingkatan, dan Relevansi Jarh wa Ta'dil dalam Verifikasi Hadis

Zikri Darussamin[1], Riyadul Husnah[2,] Siti Tri Kurniasih[3]

[1, 2,3] Program Studi Ilmu Hadits, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
zikri.darussamin@uin-suska.ac.id

Abstract

The credibility of a hadith depends largely on the people who transmitted it. The science of jarh wa ta'dil was developed by hadith scholars to assess the reliability of narrators. This article aims to describe the concept, objectives, historical development, requirements for critics, principles for resolving conflicting assessments, and the levels of terminology of jarh and ta'dil, and to analyze how these elements work in practice and in the digital era. This study uses library research with a descriptive-analytical approach. The findings show that jarh wa ta'dil grew from informal caution in the early period into a systematic discipline; that narrator criticism requires knowledgeable and honest critics who are free from fanaticism; that conflicting assessments are resolved through established principles such as the priority of explained criticism and weighing (tarjih); and that narrator assessment is only one part of hadith verification, which must also consider the continuity of the chain, irregularity (shudhudh), and hidden defects ('illah). The caution embodied in this discipline offers an ethical orientation for verifying information in the digital era, provided that its application respects the limits of the method.
Keywords: Jarh wa Ta'dil, narrator criticism, sanad criticism, terminology levels, information verification

Abstrak

Kualitas sebuah hadis sangat ditentukan oleh kualitas para perawinya. Karena itu, ulama hadis menyusun ilmu jarh wa ta'dil sebagai perangkat untuk menilai kelayakan perawi. Artikel ini bertujuan menguraikan konsep, tujuan, sejarah, syarat kritikus, kaidah penyelesaian perbedaan penilaian, dan tingkatan lafaz jarh dan ta'dil, kemudian menganalisis penerapan serta relevansinya pada masa kini. Penelitian menggunakan metode kepustakaan dengan analisis deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa jarh wa ta'dil berkembang dari kehati-hatian yang bersifat informal pada masa awal menjadi disiplin yang sistematis; bahwa kritik perawi menuntut kritikus yang berilmu, jujur, dan bebas dari fanatisme; bahwa perbedaan penilaian diselesaikan melalui kaidah seperti pendahuluan jarh yang dijelaskan sebabnya dan tarjih; serta bahwa penilaian perawi hanyalah satu bagian dari verifikasi hadis yang harus dibaca bersama kesinambungan sanad, ketiadaan syadz, dan ketiadaan 'illat. Prinsip kehati-hatian dalam disiplin ini memberi orientasi etis bagi verifikasi informasi di era digital, selama penerapannya tetap menghormati batas metodenya.
Kata kunci: Jarh wa Ta'dil, kritik perawi, kritik sanad, tingkatan lafaz, verifikasi informasi

Copyright (c) 2026 Zikri Darussamin, Riyadul Husnah, Siti Tri Kurniasih
✉Corresponding author: Zikri Darussamin
Email Address: zikri.darussamin@uin-suska.ac.id (Program Studi Ilmu Hadits, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)
Received 19 Oktober 2026, Accepted 28 Oktober 2026, Published 13 November 2026

PENDAHULUAN

Hadis adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an, sehingga kebenaran penisbatannya kepada Nabi saw. tidak boleh dianggap remeh. Berbeda dengan Al-Qur'an yang dijaga melalui periwayatan massal, hadis sampai kepada generasi kini melalui rantai periwayat (sanad) yang kualitasnya beragam. Ulama hadis menyadari bahwa menerima riwayat tanpa menyelidiki siapa yang menyampaikannya membuka pintu bagi kekeliruan, bahkan pemalsuan. Dari kesadaran inilah lahir berbagai metode kritik hadis (Imron, 2017).

Salah satu metode yang paling mendasar ialah ilmu *al-jarh wa al-ta'dil*. Ilmu ini menilai perawi dari dua sisi: sisi kelemahan (*jarh*) dan sisi kelayakan (*ta'dil*). Hasil penilaian itu menjadi pertimbangan utama untuk menerima atau menolak sebuah riwayat (Muvid et al., 2022). Meski demikian, penilaian

terhadap perawi tidak selalu seragam. Seorang kritikus dapat menilai seorang perawi terpercaya, sementara kritikus lain menilainya lemah. Perbedaan ini bukan alasan untuk meragukan seluruh ilmu ini, melainkan menunjukkan perlunya kaidah yang jelas agar penilaian tidak bergantung pada selera atau kepentingan pribadi (Rafiq et al., 2025).

Sejumlah kajian terbaru juga menegaskan bahwa metodologi jarh wa ta'dil masih relevan untuk menilai riwayat yang beredar pada masa kini (Afandi et al., 2024). Namun, relevansi itu jarang dijelaskan secara rinci, terutama bagaimana prinsip-prinsip klasik dapat dibaca ulang dalam situasi ketika informasi, termasuk yang mengatasnamakan agama, menyebar dengan sangat cepat melalui media digital.

Berangkat dari hal tersebut, artikel ini memiliki dua tujuan. *Pertama,* memaparkan kerangka dasar jarh wa ta'dil, yaitu pengertian, tujuan, syarat, kaidah, dan tingkatan lafaz. *Kedua*, membahas bagaimana kerangka itu bekerja dalam praktik, apa saja keterbatasannya, dan apa pelajaran yang dapat diambil untuk sikap verifikasi informasi di era digital.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari karya Ulumul Hadis, terutama tulisan Muhammad 'Ajjaj al-Khatib dan Manna' al-Qaththan, serta artikel ilmiah tentang jarh wa ta'dil yang terbit dalam jurnal nasional. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis: konsep dan kaidah dipaparkan terlebih dahulu, kemudian dianalisis hubungan antarkonsep, cara kerjanya dalam menilai perawi, serta implikasinya bagi kajian hadis kontemporer. Contoh kasus dalam pembahasan bersifat ilustratif dan disusun untuk memperjelas kaidah, bukan untuk menilai perawi tertentu.

Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan pengertian, tujuan, syarat, kaidah, dan tingkatan Jarh wa Ta'dil. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menguraikan hubungan antara konsep-konsep tersebut dan fungsinya dalam menentukan kredibilitas perawi serta penerimaan suatu riwayat hadits.

HASIL DAN DISKUSI

Konsep Ilmu Jarh wa Ta'dil

Istilah jarh wa ta'dil ***(***الجرح والتعديل***)*** terdiri dari dua kata yang saling berlawanan. Secara bahasa, al-jarh ***(***الجَرْح***)*** adalah mashdar dari kata جَرَحَ – يَجْرَحُ yang berarti melukai, baik secara fisik maupun nonfisik; luka fisik seperti goresan benda tajam, sedangkan luka nonfisik seperti sakit hati karena ucapan kasar. Dari makna ini, jarh dipahami sebagai luka, cela, atau cacat (Solahuddin & Suyadi, 2013). Dalam istilah ilmu hadis, al-jarh didefinisikan sebagai berikut.

ظُهُورُ وَصْفٍ فِي الرَّاوِي يُفْسِدُ عَدَالَتَهُ أَوْ يُخِلُّ بِحِفْظِهِ وَضَبْطِهِ مِمَّا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ سُقُوطُ رِوَايَتِهِ أَوْ ضَعْفُهَا وَرَدُّهَا

Artinya: munculnya suatu sifat pada diri perawi yang merusak keadilannya atau mengganggu

hafalan dan ketelitiannya, sehingga riwayatnya gugur, lemah, atau tertolak (al-Khatib, 1989).

Al-ta'dil ***(***التعديل***)*** berasal dari akar kata 'adl ***(***عَدَلَ***)*** yang bermakna menyeimbangkan atau meluruskan. Dalam istilah hadis, al-ta'dil didefinisikan sebagai berikut (Ilham et al., 2024).

وَصْفُ الرَّاوِي بِصِفَاتٍ تُزَكِّيهِ فَتَظْهَرُ عَدَالَتُهُ وَيُقْبَلُ خَبَرُهُ

Artinya: menyifati perawi dengan sifat-sifat terpuji sehingga tampak keadilannya dan riwayatnya dapat diterima. Dengan demikian, ilmu jarh wa ta'dil secara keseluruhan dirumuskan oleh al-Khatib (1989) sebagai berikut.

الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي أَحْوَالِ الرُّوَاةِ مِنْ حَيْثُ قَبُولُ رِوَايَتِهِمْ أَوْ رَدُّهَا

Artinya: ilmu yang membahas keadaan para perawi dari sisi diterima atau ditolaknya periwayatan mereka.

Ada satu catatan penting yang kerap terlewat. Ta'dil terhadap seorang perawi tidak otomatis membuat semua riwayatnya sahih. Hadis sahih menuntut sanad bersambung, perawi adil dan dhabit, serta bebas dari syadz dan 'illat. Jarh wa ta'dil menjawab satu syarat saja dalam rangkaian itu, yakni kualitas pribadi dan intelektual perawi. Memahami batas ini mencegah dua kesalahan sekaligus: mengira bahwa perawi tsiqah pasti selalu benar, dan mengira bahwa perawi lemah pasti salah pada setiap riwayatnya.

Tujuan Ilmu Jarh wa Ta'dil

Tujuan utama ilmu ini adalah mengetahui kualitas perawi sehingga dapat ditentukan apakah riwayatnya layak diterima (Manna' al-Qaththan, 2013). Tujuan tersebut dapat diurai menjadi lima fungsi sebagai berikut:

1. Mengetahui kredibilitas perawi**.** Penerimaan riwayat bergantung pada kriteria ilmiah tentang kejujuran dan keadilan, bukan pada nama besar atau kedudukan sosial seseorang.
2. Menilai ketelitian perawi, Orang yang saleh belum tentu kuat hafalannya. Perawi yang jujur tetapi sering keliru tetap perlu diperlakukan dengan hati-hati.
3. Menentukan diterima atau ditolaknya riwayat. Hasil penilaian perawi menjadi bahan keputusan, tetapi keputusan akhir tetap mempertimbangkan seluruh sanad dan unsur kritik lainnya.
4. Menjaga kemurnian hadis. Penyaringan perawi membantu membedakan riwayat yang berdasar kuat dari riwayat yang bermasalah.
5. Menjadi pedoman penelitian sanad. Ilmu ini memberi kaidah untuk membaca kitab-kitab rijal, memahami istilah penilaian, dan menyelesaikan perbedaan pendapat kritikus.

Perlu ditegaskan bahwa tujuan ilmu ini bukan merendahkan pribadi perawi. Kritik dilakukan demi menjaga agama, dan karena itu harus berbasis bukti, kaidah, dan pertimbangan ilmiah.

Perkembangan Historis: dari Kehati-hatian Awal hingga Disiplin yang Sistematis

Perkembangan jarh wa ta'dil dapat dibaca dalam tiga fase besar.

Fase awal: kehati-hatian yang bersifat spontan. Pada masa Nabi saw. dan para sahabat, penilaian terhadap orang yang menyampaikan kabar sudah ada dalam bentuk sederhana, misalnya sikap selektif terhadap berita yang dibawa orang yang tidak dikenal. Pada fase ini penilaian bersifat personal

dan belum dirumuskan sebagai ilmu, karena para periwayat umumnya saling mengenal dan sanad masih pendek.

Fase pertumbuhan: sanad menjadi pertanyaan wajib. Seiring meluasnya wilayah Islam dan munculnya perselisihan serta riwayat yang tidak jelas asalnya, para tabi'in dan generasi sesudahnya mulai menanyakan sumber setiap riwayat. Sanad tidak lagi sekadar pelengkap, tetapi menjadi syarat penerimaan. Pertanyaan tentang siapa yang meriwayatkan melahirkan kebutuhan untuk menilai siapa yang layak dipercaya. Pada masa ini nama-nama kritikus seperti Syu'bah dan Yahya bin Sa'id al-Qaththan dikenal sebagai figur yang memberi penilaian terhadap para perawi (Imron, 2017).

Fase kodifikasi: dari ucapan lisan menjadi karya tertulis. Penilaian yang semula tersebar dalam pengajaran dan tanya jawab kemudian dihimpun dalam kitab-kitab rijal dan kitab khusus jarh wa ta'dil. Ibn Abi Hatim, misalnya, dikenal menyusun karya khusus tentang jarh wa ta'dil, dan Ibn Hajar al-'Asqalani menyusun ringkasan penilaian perawi yang sangat berpengaruh (Ilham et al., 2024). Pada tahap inilah lafaz penilaian dipetakan menjadi tingkatan dan kaidah penyelesaian perbedaan dirumuskan (Afandi et al., 2024).

Pola perkembangan ini memperlihatkan bahwa jarh wa ta'dil tumbuh sebagai jawaban atas masalah nyata: semakin panjang rantai periwayatan dan semakin luas penyebaran riwayat, semakin besar kebutuhan akan alat verifikasi yang terukur.

Syarat-syarat Kritikus

Penilaian terhadap perawi tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Literatur menyebut sejumlah syarat bagi kritikus (Muvid et al., 2022), yang dapat dikelompokkan menjadi tiga ranah.

1. Ranah keilmuan: menguasai ilmu hadis dan keadaan para perawi, mengetahui sebab-sebab jarh dan ta'dil, serta memahami bahasa Arab. Penguasaan bahasa penting karena lafaz seperti *tsiqah*, *shaduq*, *dha'if*, dan *matruk* menunjuk tingkat penilaian yang berbeda dan tidak boleh dimaknai sekenanya.
2. Ranah moral: bertakwa, memiliki sifat *wara'*, dan jujur. Kritikus tidak boleh menambahkan cela yang tidak terbukti atau memberi pujian yang tidak sesuai kenyataan.
3. Ranah objektivitas: menghindari fanatisme terhadap kelompok, mazhab, atau individu, serta memahami keadaan perawi yang dinilai sehingga pernyataan kritik tidak dibaca lepas dari konteksnya.

Pengelompokan ini menunjukkan bahwa kompetensi dalam jarh wa ta'dil bersifat ganda: ilmu tanpa kejujuran berbahaya, sedangkan kejujuran tanpa ilmu rawan keliru. Keduanya harus hadir bersama agar penilaian dapat dipertanggungjawabkan.

Kaidah Penyelesaian Perbedaan Penilaian

Karena kritikus dapat berbeda pendapat tentang satu perawi, ulama merumuskan sejumlah kaidah. Srifariyati (2020) menekankan bahwa penilaian tidak cukup dibaca dari satu ungkapan; harus dilihat kredibilitas penilainya, lafaz yang dipakai, dan cara menyelesaikan pertentangan jarh dan ta'dil. Ringkasan kaidah-kaidah tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kaidah jarh wa ta‘dil, intinya, dan catatan penerapan

No	Kaidah	Inti	Catatan penerapan
1	Jarh mufassar didahulukan atas ta‘dil	Kritik yang disertai sebab yang jelas lebih diutamakan	Sebab harus valid dan relevan dengan kualitas riwayat
2	Ta‘dil didahulukan atas jarh	Pendapat yang menimbang jumlah penilai positif	Bukan kaidah mutlak; tidak menggugurkan jarh yang kuat
3	Tarjih	Memilih penilaian yang lebih kuat	Mempertimbangkan kompetensi, alasan, dan bukti, bukan jumlah semata
4	Jarh mubham	Kritik tanpa alasan	Diperselisihkan; umumnya belum cukup untuk menolak perawi
5	Ta‘dil mubham	Pujian tanpa rincian	Dapat diterima dari ulama yang memenuhi syarat
6	Jumlah penilai	Cukup satu atau perlu dua ulama	Jumhur menerima satu penilai yang memenuhi syarat
7	Tingkat ketelitian kritikus	Ada yang longgar (*mutasahil*) dan ketat (*mutasyaddid*)	Penilaian dibaca sesuai kecenderungan kritikusnya

Beberapa kaidah ini layak dibahas lebih dalam karena sering disalahpahami.

Jarh mufassar versus ta‘dil. Logika kaidah ini sederhana: pihak yang menjelaskan cacat perawi mungkin mengetahui sesuatu yang tidak diketahui pihak yang memuji (Imron, 2017). Namun, kaidah ini bukan izin untuk menerima setiap kritik. Sebab yang disebutkan harus dapat diperiksa. Jika alasannya lemah, misalnya hanya berupa perselisihan pribadi, kritik tersebut tidak cukup untuk menjatuhkan perawi.

Mengapa ta‘dil didahulukan atas jarh bukan kaidah mutlak. Banyaknya pemuji tidak serta-merta mengalahkan satu kritik yang terbukti. Sebaliknya, kritik yang kabur tidak boleh mengabaikan pujian dari ulama yang memahami perawi tersebut (Srifariyati, 2020). Dengan kata lain, kaidah ini lebih tepat dipahami sebagai pengingat untuk tidak tergesa-gesa menggugurkan perawi, bukan sebagai rumus yang berlaku di semua keadaan.

Jarh dan ta‘dil mubham. Terdapat asimetri yang menarik. Kritik tanpa alasan cenderung diminta penjelasannya karena dampaknya menjatuhkan perawi, sedangkan pujian tanpa rincian dapat diterima bila berasal dari ulama yang ahli (Srifariyati, 2020; Alipullah & Firdausy, 2024). Asimetri ini masuk akal karena sikap awal terhadap sesama muslim adalah husnuzan; yang hendak dicabut dari seseorang harus lebih kuat dasarnya daripada yang hendak ditetapkan.

Perbedaan karakter kritikus. Ulama hadis dikenal memiliki kecenderungan yang berbeda. Ibn Hibban, al-Hakim, dan al-Tirmidzi sering dicatat lebih longgar dalam sejumlah penilaian, sedangkan Syu‘bah, Yahya bin Sa‘id al-Qaththan, Abu Hatim al-Razi, dan Ibn Ma‘in dalam beberapa kasus dikenal lebih ketat. Peneliti yang membaca satu lafaz dari dua kritikus berbeda tidak boleh menyamakan bobotnya. Alipullah dan Firdausy (2024) menunjukkan hal ini melalui ungkapan *lā ba’sa bihi*, yang maknanya bergantung pada kebiasaan pemakai istilah, bukan pada arti harfiahnya saja.

Tingkatan Lafaz Jarh dan Ta‘dil

Ulama menyusun tingkatan lafaz agar kekuatan suatu penilaian dapat diketahui. Jumlah tingkatannya berbeda: Ibn Abi Hatim, Ibn al-Salah, dan al-Nawawi dikenal membaginya menjadi

empat, sedangkan Ibn Hajar al-'Asqalani membaginya menjadi enam (Muvid et al., 2022). Tingkatan ta'dil menurut pembagian yang dikaitkan dengan Ibn Hajar adalah sebagai berikut.

1. Pujian tertinggi, misalnya *awthaq al-nas* dan *athbat al-nas* (orang yang paling terpercaya).
2. Pujian yang diperkuat, misalnya *tsiqah tsiqah* atau *tsiqah tsabt*.
3. Pujian yang kuat, misalnya *tsiqah*, *tsabt*, atau *hafizh*.
4. Pujian yang menunjukkan kejujuran, misalnya *shaduq*, *ma'mun*, atau *lā ba'sa bihi*.
5. Pujian dengan catatan, misalnya *shaduq lahu awham* atau *shaduq yukhti'*.
6. Pujian paling rendah, misalnya *maqbul*, yang bernilai positif namun perlu kehati-hatian (Ilham et al., 2024).

Adapun tingkatan jarh disusun dari yang paling ringan hingga paling berat.

1. *Layyin al-hadits*: kurang kuat; riwayatnya perlu diteliti dan dapat menjadi pendukung.
2. *Laysa bi al-qawiyy*: tidak kuat; belum dapat berdiri sendiri sebagai hujah.
3. *Dha'if al-hadits*: lemah; tidak langsung diterima hanya dari jalur tersebut.
4. *Matruk al-hadits* atau *wahi al-hadits*: riwayatnya ditinggalkan karena sangat lemah.
5. *Muttaham bi al-kadzib*: dituduh berdusta.
6. *Kadzdzab* atau *wadhdha'*: pendusta atau pemalsu hadis.

Susunan dan rincian lafaz pada setiap tingkat dapat berbeda antarulama, sehingga tingkatan di atas lebih tepat dibaca sebagai peta umum, bukan daftar baku yang berlaku seragam.

Analisis: Bagaimana Kaidah Bekerja dalam Praktik

Seluruh unsur di atas dapat digabungkan dalam satu alur kerja. Sebuah ilustrasi hipotetis dapat menjelaskannya. Misalkan seorang peneliti menelaah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh perawi X. Ia membuka kitab rijal dan menemukan tiga informasi: dua ulama menyebut X sebagai *tsiqah*, satu ulama menyebutnya *dha'if*, dan ulama keempat menyebutnya *shaduq yukhti'*. Langkah analisisnya kira-kira sebagai berikut.

1. Memeriksa apakah jarh disertai alasan. Jika ulama yang melemahkan hanya menulis *dha'if* tanpa sebab, itu termasuk jarh mubham dan belum cukup untuk menolak X.
2. Memeriksa siapa kritikusnya. Apakah ia dikenal ketat atau longgar? Apakah ia sezaman atau dekat dengan X sehingga mengetahui keadaannya? Pertanyaan ini sejalan dengan kaidah tentang perbedaan ketelitian kritikus.
3. Membaca lafaz sesuai tingkatannya. *Shaduq yukhti'* berada pada tingkat pujian dengan catatan. Artinya X jujur, tetapi riwayatnya perlu dicek terhadap jalur lain, khususnya pada riwayat yang hanya ia sendiri meriwayatkannya.
4. Melakukan tarjih. Jika ulama yang melemahkan menyebutkan contoh kekeliruan yang nyata dan dapat dicocokkan dengan riwayat X, penilaian itu menguat. Jika tidak, penilaian positif mayoritas tetap dipertimbangkan.
5. Mengembalikan ke sanad dan matan secara utuh. Setelah kualitas X diperoleh, peneliti masih harus memeriksa kesinambungan sanad, adanya jalur penguat, serta ada tidaknya syadz dan 'illat.

Ilustrasi ini memperlihatkan dua hal. *Pertama*, jarh wa ta'dil bekerja sebagai proses penimbangan yang berlapis, bukan pencocokan satu kata dengan satu vonis. *Kedua,* kesimpulan atas perawi biasanya bersifat bertingkat (misalnya diterima bila ada penguat), bukan hitam-putih.

Problem Subjektivitas dan Batas Metode

Kritik yang sering diajukan terhadap jarh wa ta'dil adalah anggapan bahwa penilaiannya subjektif. Kritik ini perlu ditanggapi secara jujur. Memang benar bahwa satu lafaz dapat dipahami berbeda dan bahwa kritikus memiliki kecenderungan masing-masing; kajian tentang ungkapan *lā ba'sa bihi* membuktikan bahwa problem ini nyata (Alipullah & Firdausy, 2024). Meski begitu, adanya perbedaan tidak sama dengan ketiadaan standar. Perbedaan tersebut justru ditangani melalui syarat kritikus, kewajiban menyebut sebab, tarjih, dan pembacaan lafaz menurut metode pemakainya. Dengan perangkat ini, ruang subjektivitas dipersempit meskipun tidak dihilangkan sepenuhnya (Ritonga, 2022).

Ada pula batas yang harus diakui. Pertama, informasi tentang sebagian perawi sangat sedikit sehingga penilaian bergantung pada sumber yang terbatas. Kedua, kitab-kitab rijal sendiri merupakan hasil ijtihad yang dapat ditinjau ulang. Ketiga, seperti telah disebut, kualitas perawi bukan satu-satunya penentu kualitas hadis. Peneliti yang mengabaikan batas-batas ini berisiko menjadikan hasil jarh wa ta'dil sebagai vonis final, padahal ia adalah satu tahap dalam proses yang lebih luas.

Relevansi bagi Verifikasi Informasi di Era Digital

Penyebaran informasi di media sosial menghadirkan persoalan yang secara struktur mirip dengan masalah periwayatan: pesan berpindah dari satu orang ke orang lain, sering tanpa menyebut sumber awal, dan kualitas penyampainya tidak diperiksa. Dalam konteks ini, beberapa prinsip jarh wa ta'dil dapat menjadi inspirasi (Afandi et al., 2024).

1. Memeriksa sumber, bukan hanya isi. Seperti sanad yang ditanyakan, asal-usul sebuah kabar perlu ditelusuri sebelum dibagikan.
2. Menilai kapasitas penyampai. Kejujuran saja tidak cukup; keahlian dan ketelitian pada bidang yang dibicarakan juga menentukan.
3. Menuntut alasan untuk tuduhan. Prinsip bahwa kritik harus berdasar bukti relevan bagi budaya komentar daring yang mudah menjatuhkan orang tanpa dasar.
4. Menghindari fanatisme. Menilai sebuah kabar berdasarkan siapa yang mengucapkan, bukan buktinya, adalah bentuk keberpihakan yang dilarang dalam syarat kritikus.

Meski demikian, pengalihan prinsip ini perlu hati-hati. Jarh wa ta'dil adalah metode khusus untuk periwayatan hadis dengan kaidah dan istilah yang khas; ia tidak dapat dipindahkan begitu saja menjadi alat menghakimi pribadi seseorang. Yang relevan adalah etos ilmiahnya: kehati-hatian, penelusuran sumber, dan keadilan dalam menilai.

KESIMPULAN

Ilmu jarh wa ta'dil berfungsi menilai kredibilitas perawi dari sisi keadilan dan ketelitian, dan hasilnya menjadi dasar penting dalam menentukan diterima atau ditolaknya suatu riwayat. Disiplin ini

tumbuh bertahap dari praktik kehati-hatian awal, menjadi tuntutan sanad, hingga terkodifikasi dalam kitab-kitab rijal beserta kaidah dan tingkatan lafaznya.

Penerapannya menuntut kritikus yang berilmu, jujur, dan bebas dari fanatisme, serta kaidah yang jelas untuk menyelesaikan perbedaan penilaian, seperti keharusan menyebut sebab jarh, tarjih, dan pembacaan lafaz menurut tingkatan serta kecenderungan kritikus. Perbedaan penilaian tidak otomatis menunjukkan subjektivitas, tetapi harus diuji melalui alasan dan bukti.

Pada saat yang sama, penilaian perawi hanyalah satu bagian dari verifikasi hadis yang harus dibaca bersama kesinambungan sanad dan ketiadaan syadz serta 'illat. Prinsip kehati-hatian dan keadilan ilmiah dalam jarh wa ta'dil juga memberi pelajaran bagi sikap verifikasi informasi di era digital, selama penerapannya tidak melepaskan konteks dan batas metodenya. Penelitian lanjutan dapat menelaah penerapan kaidah ini pada kasus perawi tertentu secara mendalam, atau membandingkan pembagian tingkatan antarulama secara lebih rinci.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, serta seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan kajian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan sejawat yang telah berdiskusi dan memberikan saran, serta kepada kepada para penulis daan peniliti yang karyanya menjadi rujukan dalam kajian ini. Terimakasih pula kepada redaksi dan para mitra bebestari Jurnal Pustaka Cendekia Pendidikan atas masukan yang membantu penyempurnaan naskah.

REFERENSI

Afandi, R. R., Sahrul, & Arifin, A. (2024). Metodologi Al-Jarh wa Ta'dil: Sejarah dan Signifikansinya di Era Kontemporer. *Al-Mu'tabar*, *4*(2), 59–74. https://doi.org/10.56874//almutabar.2024.v4i2/2100/5

Alipullah, R., & Firdausy, H. (2024). Misteri La Ba'sa Bihi: Mengungkap Problem Subyektifitas dalam Jarh Wa Ta'dil. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, *15*(1), 14–46. https://doi.org/10.24252/tahdis.v15i1.39327

Ilham, I. S., Labib, M. A. D. I., & Anisa, F. N. (2024). Ilmu Al-Jarh Wa At-Ta'dil dalam Hadis: Studi Komparatif Metodologi Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hatim Ar-Razi. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, *16*(2), 183–204. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v16i2.1262

Imron, A. (2017). Dasar-Dasar Ilmu Jarh Wa Ta'dil. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, *2*(2), 287–302. https://doi.org/10.14421/mjsi.22.1371

al-Khatib, M. 'A. (1989). *Ushul al-Hadits: 'Ulumuh wa Mushthalahuh*. Beirut: Dar al-Fikr.

Manna' al-Qaththan. (2013). *Pengantar Studi Ilmu Hadits*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Muvid, M. B., Arsyillah, B. T., & Muammar. (2022). Ilmu Jarh wa al-Ta‘dil dalam Tinjauan Studi Hadits. *Universum: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan*, *16*(1), 34–55. https://doi.org/10.30762/universum.v16i1.12

Rafiq, M. C., Arifin, T., & Abdulatip, T. (2025). Jarh Wa Ta’dil dalam Tinjauan Studi Hadis. *Journal for Islamic Studies*, *8*(2).

Ritonga, M. T. (2022). Metodologi Ulama Hadis dalam Jarh dan Ta’dil. *Al-Kaffah: Jurnal Kajian Nilai-Nilai Keislaman*, *10*(2), 205–224.

Solahuddin, & Suyadi, A. (2013). *Ulumul Hadits*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Srifariyati, S. (2020). Urgensi Ilmu Jarah Wa Ta’dil dalam Menentukan Kualitas Hadits. *Madaniyah*, *10*(1), 131–146.